

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 213/ITJ.1/TU.140/X/2025

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan III Tahun 2025
Tanggal : 17 Oktober 2025

Bersama ini kami melaporkan kepada Bapak, bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memandatkan untuk dilakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala (Triwulan).

Sehubungan hal tersebut, Inspektorat I telah melakukan pengukuran kinerja periode Triwulan III Tahun 2025 melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>), pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja dan diperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **105,69%** atau kategori **“Baik”**. Uraian terhadap hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja secara rinci kami sampaikan melalui Laporan Kinerja Inspektorat I sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami menyampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Sekretaris Itjen

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KKP PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa Inspektorat I memiliki tugas dan Fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi serta Pusat Kebijakan Strategis dan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Pengelolaan Kelautan, serta Pusat Data dan Informasi. Sehubungan hal tersebut Inspektorat I mempunyai peran strategis dalam mengawal program/kegiatan mitra kerja dalam mendukung pencapaian terhadap program 5 kebijakan ekonomi biru yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, 3 dari 5 kebijakan tersebut merupakan program/kegiatan yang dijalankan oleh mitra kerja Inspektorat I yaitu pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Adapun program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab mitra kerja Inspektorat I adalah program/kegiatan perluasan kawasan konservasi laut, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL). Selain hal tersebut, Inspektorat I juga melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal KKP yang memiliki tugas fungsi sebagai dukungan manajerial mulai dari perencanaan hingga pelaporan, pelaksanaan pengawasan terhadap program nasional yaitu swasembada garam nasional.

Dalam rangka mengawal program/kegiatan mitra kerja, Inspektorat I menghadapi beberapa tantangan (*strategic issues*) diantaranya adalah adanya perubahan kebijakan terkait efisiensi anggaran, sehingga hasil pengawasan belum memberikan jaminan secara maksimal berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan. Selain hal tersebut keterbatasan SDM Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagai pelaksana yang mengawal setiap pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja. Menghadapi tantangan

tersebut, Inspektorat I selalu berupaya untuk memberikan pendampingan/pengawasan semaksimal mungkin terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, mulai dengan menyusun program pengawasan melalui pendekatan penilaian risiko atas program/kegiatan yang telah ditetapkan, selain hal tersebut dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat I telah memanfaatkan peran teknologi informasi dengan melakukan pengawasan secara online terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada mitra kerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat I sebagai *quality assurance* maupun *consulting partner* terhadap mitra kerjanya perlu menyusun rencana kinerja dalam rangka mengawal program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kementerian. Dalam hal ini, Inspektorat I merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal KKP telah menetapkan rencana kinerja yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai target strategis dan operasional antara Inspektur Jenderal dengan Inspektur I sebagai pimpinan unit kerja. Adapun tujuan ditetapkannya PK tersebut adalah sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai alat monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan kinerja bagi penerima amanah.

Kinerja Tahun 2025 lingkup Inspektorat I, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan penetapan target pada masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana pada tabel berikut.

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Target
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2.	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86
		3.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Target
		4.	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
2.	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	5.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85
		6.	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100

Berdasarkan PK tersebut, Inspektorat I mempunyai kewajiban untuk melakukan pengukuran secara periodik terhadap target pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan serta melaporkannya kepada pimpinan unit kerja Eselon I. Selain hal itu, Inspektorat I juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian atas Rencana Aksi (Renaksi) sebagai bentuk strategi dalam rangka mencapai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja pada laman <https://kinerjaku.kkp.go.id/> diketahui bahwa Inspektorat I pada periode Triwulan III Tahun 2025 memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,69%** atau dengan kategori **“Baik”**. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Sasaran Kinerja sebagai berikut:

- 1) SK.01 “Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I” dengan capaian 111,37%;
- 2) SK.02 “Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I” dengan capaian 100%.

Capaian Sasaran Kinerja tersebut diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja yang menjadi target pengukuran periode Triwulan III Tahun

2025. Adapun penjelasan terhadap hasil pengukuran indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) IKSK.01.1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%).

Pengukuran pada indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah nilai temuan keuangan (nilai Tuntutan Ganti Rugi) dari hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Unit Eselon I (mitra) Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024 (mitra).

Nilai capaian pada indikator ini sebesar 120% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\leq 0,5$. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap perbandingan antara nilai temuan keuangan (nilai Tuntutan Ganti Rugi) dengan realisasi anggaran pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) sebesar 0,17, dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	Nilai Temuan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1. Setjen	1.885.275.241	822.863.865.685	0,23
2. Ditjen PKRL	357.650.852	471.154.781.232	0,08
Jumlah	2.242.926.093	1.294.018.646.917	0,17

Capaian pada IKSK.01.1 pada periode Triwulan III Tahun 2025 masih sama (stabil) jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 meskipun secara nilai persentase perbandingan antara nilai temuan keuangan (nilai Tuntutan Ganti Rugi) dengan realisasi anggaran mengalami peningkatan di Tahun 2025 yaitu sebesar 0,10%. Selain hal tersebut capaian kinerja IKSK.01.1 tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2025 karena tidak dilakukan pengukuran, adapun data perkembangan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024		Triwulan II Tahun 2025		Triwulan III Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK	0,07%	120%	-	-	0,5%	0,17%	120%		0,17%

atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)								0,5%	
--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

2) IKSK.01.2 Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%).

Persentase implementasi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup Unit Eselon I berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB Unit Eselon I yang telah ditetapkan.

(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Tahunan (pada Triwulan IV) -----).

3) IKSK.01.3 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%).

Pengukuran capaian Indikator Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adapun hasil pengukuran terhadap persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sebesar **87,33%** atau nilai capaiannya sebesar **102,74%**. Nilai persentase jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **85,00%**, dengan uraian:

- a. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Sekretariat Jenderal KKP yaitu dari 17 LHP dengan 71 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau sebanyak 71 rekomendasi telah **berstatus TUNTAS** dengan capaian **100%**;
- b. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yaitu dari 36 LHP dengan 200 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 163 rekomendasi dengan **status TUNTAS** atau capaiannya sebesar **81,50%**, dan masih terdapat sisa sebanyak 37 (tiga) rekomendasi belum dinyatakan tuntas;

- c. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu dari 4 LHP dengan 21 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau sebanyak 21 rekomendasi telah **berstatus TUNTAS** dengan capaian **100%**;

Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Triwulan II Tahun 2025) yaitu sebesar 116,05% dan periode Triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar 120%, data perkembangan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024		Triwulan II Tahun 2025		Triwulan III Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	97,07%	120%	98,64%	116,05%	85%	87,33%	102,74%	85%	102,74%

Penurunan capaian pada Indikator Kinerja ini disebabkan adanya kenaikan target di Tahun 2025 menjadi 85% jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 yaitu 80%. Selain hal tersebut, terdapat rekomendasi hasil pengawasan periode Triwulan II Tahun 2025 yang memerlukan waktu lebih lama dalam menindaklanjutinya sebagai dampak pemisahan organisasi Unit Kerja Eselon I yaitu Ditjen PKRL menjadi Ditjen PK dan Ditjen PRL.

Sebagai upaya percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal, Inspektorat I telah melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pada mitra kerja secara berkala (bulanan) melebihi dari target yang ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu secara Triwulanan. Selain hal tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi tindak lanjut (SIDAK) yang membantu menyediakan data hasil pengawasan serta upaya penyelesaian/tindak lanjut yang telah dilakukan mitra kerja secara *update/real time*.

- 4) IKS.01.4 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi).

Rekomendasi kebijakan merupakan masukan/saran dari hasil kajian Itjen yang diberikan kepada mitra kerja dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan/ pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan pada tingkat kementerian/eselon I/eselon II.

(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Semesteran-----).

- 5) IKS.02.1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)

Telaah sejawat adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Inspektorat lain lingkup Itjen KKP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan standar pengawasan intern.

(-----tidak dilakukan pengukuran dikarenakan telah dilakukan pengukuran di Periode Triwulan II -----).

- 6) IKS.02.2 Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%).

Merupakan sebuah ukuran dari implementasi pemanfaatan sistem informasi dalam membantu dan mendukung tugas pelaksanaan pengawasan intern oleh unit kerja lingkup Itjen KKP.

(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode Semesteran-----).

- 7) IKS.02.3 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat dijalankan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran pada indikator kinerja ini diperoleh dari tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja dan anggaran melalui pemenuhan terhadap:

- a. Penyampaian laporan kinerja Triwulan II Tahun 2025;

- b. Pengisian data capaian kinerja Triwulan II Tahun 2025 pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id);
- c. Monitoring dan evaluasi Renaksi pencapaian target kinerja Triwulan II Tahun 2025;
- d. Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPj) Triwulan III Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa capaian kinerja sebesar 100% atau seluruh dokumen di atas telah dipenuhi oleh Inspektorat I secara tertib. Adapun perkembangan capaian kinerja jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Triwulan III Tahun 2024 serta Triwulan II Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan (capaian kinerja stabil).

Indikator Kinerja	Triwulan III Tahun 2024		Triwulan II Tahun 2025		Triwulan III Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan secara tertib dan tepat waktu dalam hal:

- a. Pengisian capaian kinerja pada aplikasi kinerjaku dan realisasi kegiatan melalui aplikasi e-monev Bappenas;
- b. Penyampaian Laporan Kinerja/Data Capaian Kinerja (Triwulan);
- c. Pemantauan kepatuhan pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Penyusunan laporan evaluasi rencana aksi.

B. Realisasi Anggaran

Untuk menjalankan pengawasan terhadap mitra kerja, Inspektorat I berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA_032.02.1.622098/2025 tanggal 2 Desember 2024, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.502.179.000,00 serta mengalami perubahan menjadi Rp4.971.127.000,00 atau sebesar 6,07% dari anggaran total Inspektorat Jenderal sebesar Rp81.913.169.000,00. Sehubungan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Itjen KKP melaksanakan efisiensi anggaran sebesar Rp36.881.656,00 atau 45,03% dari pagu awal, dan hal ini berdampak pada anggaran yang dikelola Inspektorat I menjadi sebesar **Rp461.398.000,00**, terdiri dari: kegiatan pengawasan intern pada mitra sebesar Rp428.208.000,00 dan pelaksanaan pengawasan kegiatan prioritas/strategis mitra sebesar Rp33.190.000,00.

Perkembangan realisasi anggaran sampai dengan September 2025 secara akrual sebesar **Rp348.392.360,00** atau sebesar 75,51% dengan sisa anggaran sebesar **Rp113.005.640,00** atau sebesar 24,49% dari pagu efektif. Adapun rincian realisasi anggaran yaitu terdiri dari belanja bahan sebesar Rp10.374.000,00, belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp310.528.360,00 dan perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp27.490.000,00.

C. Capaian Rencana Aksi (Renaksi) Pencapaian Target Kinerja

Inspektorat I telah melakukan monitoring secara berkala terhadap Renaksi pencapaian target kinerja dimana pada periode Triwulan III Tahun 2025 diketahui terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang dijabarkan kedalam 14 kegiatan pendukung dengan 37 target/output yang harus dicapai. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa terhadap 37 target/output telah terealisasi seluruhnya atau 100%, secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

D. Kendala/Permasalahan dan Saran

Tidak terdapat kendala/permasalahan dalam mencapai target kinerja periode Triwulan III Tahun 2025, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, meskipun mengalami penurunan secara Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dari periode sebelumnya yaitu 113,85% menurun menjadi 105,69%. Selain hal tersebut, terdapat perubahan pelaksanaan pengawasan yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen PKPT yaitu pelaksanaan reviu RKBMN Tahun 2027 yang menjadi pengawasan non PKPT, dikarenakan menyesuaikan dengan permintaan mitra kerja sesuai Surat Setjen Nomor 070/SJ.2/TU.140/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 dan Surat Nomor B.2566/SJ.2/TU.330/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025. Serta adanya pergeseran waktu pelaksanaan pengawasan kegiatan LAUTRA dari Agustus 2025 menjadi September 2025, hal ini disebabkan pada bulan Agustus 2025 capaian

realisasi keuangan kegiatan dimaksud masih rendah yaitu masih sebesar 0,16% dari pagu anggaran, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan.

Terkait kondisi tersebut Inspektorat I telah menindaklanjutinya dengan mengusulkan revisi PKPT melalui Nota Dinas Inspektur I kepada Sekretaris Itjen Nomor 166//ITJ.1/TU.140/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

E. Tindak Lanjut

Tidak adanya rekomendasi atas permasalahan pada laporan kinerja periode Triwulan II Tahun 2025 sehingga tidak terdapat tindak lanjut pada laporan kinerja periode ini. Namun demikian, Inspektorat I dalam rangka menjaga kualitas pengawasan selalu berpedoman pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 21 Tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan tata kelola pengawasan intern di lingkungan KKP serta secara periodik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PKPT.

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2025, Inspektorat I memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,69%** atau dengan kategori **“Baik”**, nilai kinerja ini diperoleh melalui pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil pengukuran adalah 2 (dua) indikator kinerja mendapatkan nilai yang melebihi dari target kinerja dan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat I untuk selalu mencapai target yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan melakukan monitoring secara periodik baik secara tatap muka maupun secara tertulis dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Inspektorat I selalu berupaya melakukan perbaikan dengan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pengawasan salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi dalam membantu proses pengawasan dan pemantauan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan. Selain hal tersebut, Inspektorat I juga meningkatkan peran sebagai *consulting partner* dalam rangka mendeteksi awal adanya hambatan/penyimpangan pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja, serta pelaksanaan pengawasan yang bersifat non PKPT dalam rangka memberikan pengawalan/pendampingan terhadap program/kegiatan mitra.

BAB V. LAMPIRAN

Capaian kinerja yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja tidak terlepas dari bukti dukung yang telah dikumpulkan untuk memperkuat capaian pada masing-masing indikator kinerja, adapun bukti dukung dimaksud disampaikan sebagai lampiran pada laporan kinerja ini sebagai berikut (bukti dukung dapat diunduh melalui laman: https://drive.google.com/drive/folders/1WgVk8OyL7X3a7PDoCm6fHvvx_TCG738O?usp=drive_link) :

1. Perjanjian Kinerja Inspektur I;
2. Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 82/ITJ/RC.610/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP;
3. Nota Dinas Inspektur I kepada Sekretaris Itjen Nomor 205/ITJ.1/HP.550/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 perihal Progres Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2025 pada Mitra Inspektorat I;
4. Nota Dinas Sekretaris Itjen Nomor 944/ITJ.0/RC.610/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP;
5. Memorandum Inspektur I Nomor 131/ITJ.1/TU.140/VII/2025 perihal Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2025;
6. Tangkap layar pengisian kinerja Triwulan III pada aplikasi kinerjaku;
7. Nota Dinas Inspektur I Nomor 206/ITJ.1/HP.470/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Penyampaian Capaian Rencana Aksi Terhadap Pencapaian Target Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025;
8. Nota Dinas Inspektur I Nomor 166/ITJ.1/TU.140/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 perihal Perubahan Waktu Pengawasan dari Jadwal PKPT;
9. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan periode Triwulan III (Juli-September) Tahun 2025;
10. Matrik kepatuhan pelaksanaan PKPT periode Triwulan III Tahun 2025.